

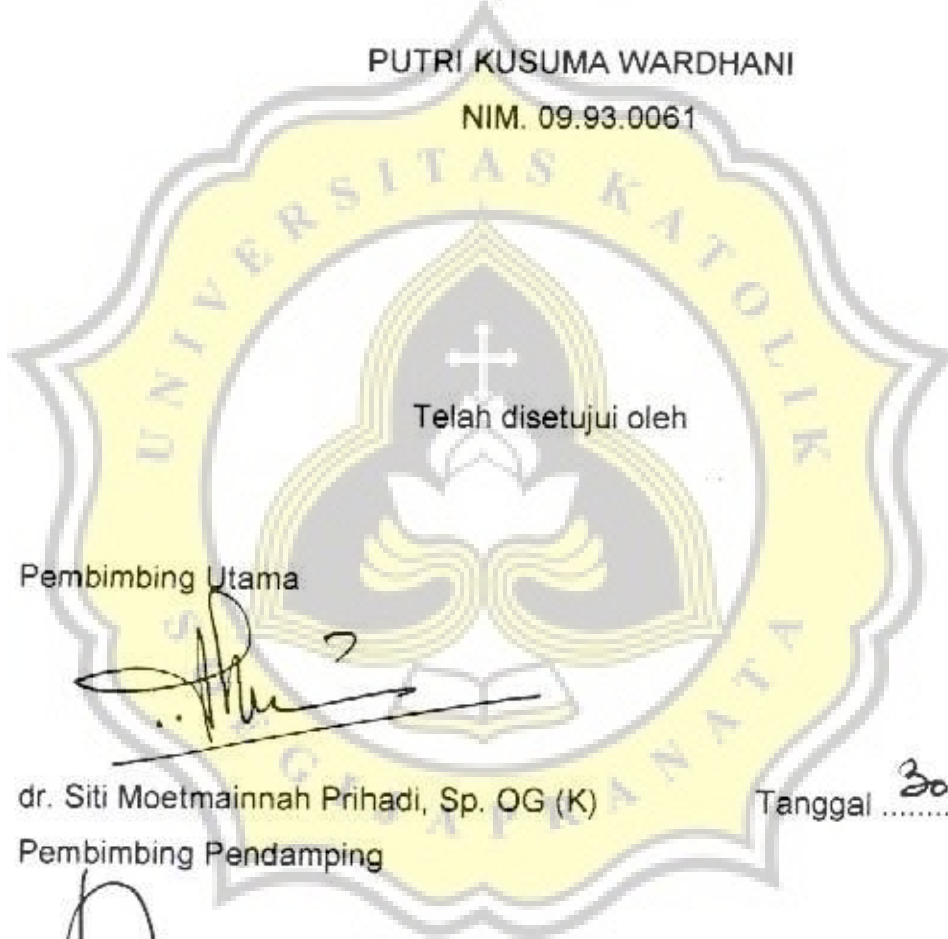
TESIS

**PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA PELAYANAN  
KB SUNTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MIJEN**

Diajukan Oleh

PUTRI KUSUMA WARDHANI

NIM. 09.93.0061



Telah disetujui oleh

Pembimbing Utama

dr. Siti Moetmainnah Prihadi, Sp. OG (K)

Tanggal 30 Nov 2012

Pembimbing Pendamping

B. Resti Nurhayati, SH., M. Hum.

Tanggal 8 Nov 2012

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: humas@unika.ac.id



**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : PUTRI KUSUMA WARDHANI

Nim : 09.93.0061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Kamis 20 Desember 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN (.....)
2. dr. Siti Moetmainnah Prihadi, SpOG(K) (.....)
3. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum (.....)
4. dr. Hadi Sulistyanto, SpPD., MH.Kes., FINASIM (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Kamis 20 Desember 2012

  
Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)  
Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya, yang memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, guna memenuhi syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul **"PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA PELAYANAN KB SUNTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MIJEN"** dimana dalam penelitian diharapkan mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan informed consent pada pelayanan KB suntik. Pelaksanaan informed consent pada pelayanan KB suntik di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen, dan hambatan hambatan dalam pelaksanaan serta cara/usaha yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan-masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik

Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama, yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat, serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. dr. Hadi Sulistyanto, Sp. PD., MH., Kes., FIN ASIM selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini
6. dr. Siti Moetmainnah Prihadi, Sp. OG (K) selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini
7. B. Resti Nurhayati, SH., M. Hum, selaku dosen pendamping yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek, khususnya aspek hukum kesehatan
9. Para staf sekretariat Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan XII tahun 2010, atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka, pengalaman,

pengetahuan, serta kerjasama yang kompak selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

11. Suami dan anak tercinta, yang telah membarikan doa, dukungan, dorongan semangat dalam mengambil dan menyelesaikan studi pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

12. Ayah (Alm) dan Ibu tercinta yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dorongan semangat serta dukungannya yang tak ternilai harganya, sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.

13. Adik tercinta, yang telah membarikan doa, dukungan, dorongan semangat dalam mengambil dan menyelesaikan studi pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan memberikan informasi, bahan pembeding dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis, serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan, dan khususnya bidang hukum kesehatan.

Semarang, Nopember 2012

Penulis

PUTRI KUSUMA WARDHANI

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Halaman Pernyataan .....	xii
Abstrak .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F Rencana Penyajian Tesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Puskesmas .....	13
B. Bidan .....	15
C. Akseptor .....	22
D. Pelayanan KB .....	22
E. Pelayanan KB Suntik .....	29
F. Transaksi terapeutik .....	30
G. Standar Operasional Pelayanan KB suntik .....	31
G. Konstruksi Teori .....	43

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum Tenaga Bidan dan Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana Suntik oleh Bidan di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen.....	45
2. Pelaksanaan dan Prosedur Informed Consent pada Tindakan Pelayanan KB Suntik oleh Bidan di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen.....	49
3. Hambatan-Hambatan yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Informed Consent Tindakan Pelayanan KB Suntik oleh Bidan di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen.....	69

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	72
2. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: langkah-langkah pelayanan KB suntik.....	41
Tabel 3.1	: karakteristik narasumber.....	47
Tabel 3.2	: karakteristik responden.....	48
Tabel 3.3	: Distribusi hasil analisa langkah 1.....	58
Tabel 3.4	: Distribusi hasil analisa langkah 2.....	58
Tabel 3.5	: Distribusi hasil analisa langkah 3.....	59
Tabel 3.6	: Distribusi hasil analisa langkah 4.....	59
Tabel 3.7	: Distribusi hasil analisa langkah 5.....	60
Tabel 3.8	: Distribusi hasil analisa langkah 6.....	60
Tabel 3.9	: Distribusi hasil analisa langkah 7.....	61
Tabel 3.10	: Distribusi hasil analisa langkah 8.....	61
Tabel 3.11	: Distribusi hasil analisa langkah 9.....	61
Tabel 3.12	: Distribusi hasil analisa langkah 10.....	62
Tabel 3.13	: Distribusi hasil analisa langkah 11.....	62
Tabel 3.14	: Distribusi hasil analisa langkah 12.....	63
Tabel 3.15	: Distribusi hasil analisa langkah 13.....	63
Tabel 3.16	: Distribusi hasil analisa langkah 14.....	63
Tabel 3.17	: Distribusi hasil analisa langkah 15.....	64
Tabel 3.18	: Distribusi hasil analisa langkah 16.....	64
Tabel 3.19	: Distribusi hasil analisa langkah 17.....	64
Tabel 3.20	: Distribusi hasil analisa langkah 18.....	65
Tabel 3.21	: Distribusi hasil analisa langkah 19.....	65
Tabel 3.22	: Distribusi hasil analisa langkah 20.....	65
Tabel 3.23	: Distribusi hasil analisa langkah 21.....	66
Tabel 3.24	: Distribusi hasil analisa langkah 22.....	66
Tabel 3.25	: Distribusi hasil analisa langkah 23.....	66
Tabel 3.26	: Distribusi hasil analisa langkah 24.....	67
Tabel 3.27	: Distribusi hasil analisa langkah 25.....	67
Tabel 3.28	: Distribusi hasil analisa langkah 26.....	67
Tabel 3.29	: Distribusi hasil analisa langkah 27.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin melakukan penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Semarang
2. Panduan wawancara narasumber (Dokter Kepala Puskesmas)
3. Panduan wawancara narasumber (Bidan Puskesmas)
4. Panduan wawancara Responden (akseptor KB suntik yang mengalami risiko)
5. Cheklist pelaksanaan tindakan



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Putri Kusuma Wardhani, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0061

Menyatakan :

1. Bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2012

Putri Kusuma Wardhani

## ABSTRACT

One of effort to reduce the population growth rate is through the Family Planning (KB) related to the use of contraceptives. Contraception is a method that can be done to delay pregnancy, space or adjust the distance of the child's age, contraceptives are also at risk. Because there is the possibility of risk occurrence, it is necessary for informed consent in practice. In this era, that various number of the lawsuits come up to the doctors and hospitals on the rights of patients to receive comprehensive health care. The explanation of medical consent/ informed consent is written in Chapter 45 UUPK. According to the PERMENKES Number. 1464 / MENKES / PER / X / 2012 Chapter 18 Subsection (1) letter b and d on the implementation of midwife practice, declare that midwives in providing services must give information and request approval for the action.

The research method uses an empiric/ sociology approach to judicial law, which studies can discuss juridical aspects and also discuss the social aspects surrounding the symptoms of certain laws. The study involved the respondent from the health care providers at the Public Health Center are 1 doctor, The head physician of the Public Health Center and 4 person are midwives and 5 people that the Injection family planning acceptors as Respondents.

The Result of this research showed that the implementation of informed consent in the act of injection contraception has not been accordance with procedures. But there are several factors that are impediments to the implementation services such as time limitations, lack of understanding of the midwives about the importance of informed consent, it's According to the PERMENKES Number. 1464 / MENKES / PER / X / 2012 Chapter 18 Subsection (1), lack of the practitioner, lack of guidance and supervision of the City Health Office (DKK) and the low level of education and knowledge from the patients about the benefit of the informed consent that cause patients do not want to know about what is informed consent. So DKK had more attention especially about informed consent.

These aspects are not appropriate with the contents of Permenkes No. 1464 About License and Implementation of The Midwife Practice Chapter 18 paragraph (1) states that " in carrying out the midwife practice are obliged to give information about the patient's health problems and services needed." So the City Health Department needs to give special attention over the issue of informed consent, in relation to the procurement of an assignment letter to the midwife about the authority in providing family planning services injections.

Keyword : informed consent, family planning services with injection contraception.

## ABSTRAK

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi merupakan suatu metode yang dapat dilakukan untuk menunda kehamilan, selain mempunyai keuntungan untuk menunda kehamilan, menjarangkan atau mengatur jarak usia anak, alat kontrasepsi juga memiliki risiko. Karena ada kemungkinan kemunculan risiko, maka diperlukan informed consent dalam pelaksanaannya. Pada era sekarang ini muncul berbagai tuntutan hukum kepada dokter dan rumah sakit mengenai hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Penjelasan mengenai persetujuan tindakan kedokteran tertulis dalam Pasal 45 UUPK. Sedangkan menurut Pasal 18 Ayat (1) Huruf b dan d Permenkes No 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, menyatakan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan harus memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris/ sosiologis, dimana studi dapat membahas aspek yuridisnya dan sekaligus membahas aspek-aspek sosialnya yang melingkupi gejala hukum tertentu. Penelitian melibatkan narasumber dari pihak penyedia layanan kesehatan di Puskesmas yaitu 1 orang dokter kepala Puskesmas dan 4 orang bidan serta 5 orang akseptor KB suntik sebagai Responden.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent pada tindakan KB suntik di wilayah kerja Puskesmas Mijen belum sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pelayanan KB Suntik. Namun walaupun belum sesuai sepenuhnya, pelaksanaan yang dilakukan sudah hampir sesuai, misalnya konseling hanya singkat sesuai pertanyaan akseptor. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya keterbatasan waktu pelayanan, kurangnya pemahaman bidan tentang pentingnya informed consent, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien terhadap manfaat informed consent yang menyebabkan pasien jadi tidak mau tahu mengenai apa itu informed consent. Aspek-aspek ini belum sesuai dengan isi Permenkes No 1464 Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 ayat (1) huruf menyebutkan bahwa "dalam menjalankan praktik / kerja bidan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan". Sehingga Dinas Kesehatan Kota perlu memberikan perhatian yang lebih khusus mengenai masalah informed consent, dalam kaitannya dengan pengadaan surat tugas kepada bidan tentang kewenangannya dalam memberikan pelayanan KB suntik.

Kata kunci : informed consent, pelayanan KB suntik